

MEMPERDALAM PASAR MENYEMAI OPTIMISME BURSA



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Daftar Isi | 2 |
| Ringkasan Eksekutif: Mendorong Bursa Saham Indonesia Berkelas Global | 3 |
| Melepas Saham Memperdalam Pasar | 5 |
| Optimisme Penyerapan Rp187 Triliun | 14 |
| Berharap pada Danantara | 22 |
| Seberapa Siapkah Emiten Indonesia Capai <i>Free Float</i> Saham 15% | 28 |

Artikel ini bisa di akses di <https://www.suar.id/>



IDEX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Foto: Kreasi Ai

Ringkasan Eksekutif: **Mendorong Bursa Saham Indonesia Berkelas Global**

Kupas tuntas aturan baru kebijakan *free float* saham minimal 15% yang mulai berlaku Maret 2026.

Penulis: **Mukhlison Widodo**

Upaya pemulihan pasar saham Indonesia terus berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama *self regulatory organization* (SRO) pasar modal telah mengambil sejumlah langkah penting, demi mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia dan mengarahkan bursa saham Indonesia selevel dengan pasar bursa kelas dunia.

Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan, khusus untuk pembahasan *free float*, pihak otoritas bursa sudah selesai melalui tahapan *public hearing* atau *rule making rule*-nya yang digelar pada tanggal 19 Februari 2025 lalu.

Semua pihak menyadari langkah menaikkan *free float* adalah upaya yang baik jika ingin melakukan pendalaman terhadap pasar modal. Meski tantangannya, bagaimana penambahan *free float* ini tidak mengganggu *price discovery*. Karena pasti akan ada tambahan suplai di market.

Poin yang menjadi kendala pengenaan *free float* 15%

- Tidak semua emiten berada pada valuasi yang ideal untuk melakukan aksi korporasi seperti secondary offering atau divestasi.
- Kesiapan investor menjadi faktor penentu, karena tidak semua saham memiliki permintaan yang cukup kuat, baik dari investor ritel maupun institusi, untuk menyerap tambahan pasokan saham.
- Terdapat potensi tekanan harga saham jika banyak emiten secara bersamaan melepas sahamnya di pasar.

Otoritas memberi waktu hingga maksimal 3 tahun bagi emiten untuk bisa memenuhi aturan yang baru soal *free float*. Regulator juga menyiapkan *exit policy* atau penyelesaian masalah bagi emiten yang tidak memenuhi ketentuan saham publik ke porsi 15%.

- Pada tahap awal, bursa akan memprioritaskan perhatian pada 49 emiten yang mewakili sekitar 90% kapitalisasi pasar dari kelompok emiten dengan *free float* rendah, mengingat potensi dampaknya terhadap likuiditas pasar secara keseluruhan.
- BEI akan memberikan pendampingan dan tahapan penyelesaian sebelum benar-benar mempertimbangkan tindakan korektif yang lebih tegas.
- Sebelum akhirnya perusahaan tercatat mengalami delisting atau penghapusan pencatatan saham, mereka diberikan waktu untuk memenuhi segala ketentuan, bantuan dari asosiasi, hingga layanan hot desk.

Masuknya BPI Danantara ke pasar modal bisa menjadi katalis positif bagi pasar modal di tengah upaya Bursa Efek Indonesia mendorong pemenuhan ketentuan *free float* minimal 15%.

BPI Danantara berpotensi memperkuat pasar jika dijalankan secara independen, profesional, dan transparan.

Implementasi kewajiban *free float* 15% ini juga membawa harapan besar bagi peningkatan likuiditas, namun sekaligus menghadirkan tantangan bagi stabilitas pasar bursa.

Fokus utama tertuju pada sektor Financials yang bukan hanya pemegang *market cap* terbesar, tetapi juga motor utama transaksi dengan nilai perdagangan (*total value*) mencapai Rp1.066 triliun atau 25% dari aktivitas bursa.

Peningkatan porsi saham publik di sektor keuangan dan infrastruktur yang merupakan dua sektor dengan total market cap gabungan hampir 40% dari bursa akan potensial dan berpengaruh besar dalam meningkatkan bobot saham-saham Indonesia dalam indeks global.



Pekerja berjalan di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (15/8/2025). PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai All Time High (ATH) ke level 8.000 dalam perdagangan intraday saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, Antara/Asprilla Dwi Adha.

Melepas Saham Memperdalam Pasar

Free float 15% jadi langkah awal reformasi pasar modal. Prosesnya tidak akan memberatkan. Tidak semua emiten berada pada valuasi yang ideal.

Penulis: Mukhlison Widodo, Benediktus Krisna Yogatama, Gema Dzikri Harisma, Feby Febrina Nadeak

Sebagai pasar yang modern dan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah selangkahnya menjadi bursa kelas dunia. Setara dengan bursa-bursa besar global.

“Tidak hanya soal kapitalisasi pasar dan nilai transaksi. Tetapi juga soal transparansi dan tata kelola. Itu komitmen pertama kami pada publik, tentu itu harus diaktualisasikan,” kata Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik saat ditemui SUAR di kantornya, Rabu 25 Februari 2026 lalu.

Jeffrey mengatakan, sejak awal dirinya diberi amanah sebagai pejabat sementara direktur utama bursa pada 12 Februari 2026 lalu, transparansi akan menjadi kunci utama dalam melakukan reformasi di pasar modal Indonesia. Salah satu langkah awal reformasi yang saat ini sedang digulirkan adalah menaikkan angka *free float* hingga 15%.

Rencana penerapan kenaikan *free float* ini sudah diwacanakan sejak



Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik. Foto: Suar.id/Sutta Dharmasaputra.

Desember lalu, namun prosesnya akan dipercepat, setelah badai menerpa pasar saham Indonesia pada akhir Januari lalu. Pada 28 Januari 2026 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambruk 659,67 poin atau jeblok 7,35% sehingga terdampar pada level 8.320,55. Pada hari itu perdagangan juga merosot lebih dari 8% sehingga memicu *trading halt* atau penghentian sementara perdagangan karena ambang batas koreksi harian tercapai.

Pergerakan IHSG Sepanjang 2026



Sumber: IDX. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash.

Hampir seluruh saham berada di zona merah, dengan 768 saham turun harganya dan hanya 28 saham yang naik. Pemicu utama dari kejadian ini adalah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan perubahan metodologi penghitungan *free float*.

Banyak saham berkapitalisasi besar Indonesia yang masuk indeks MSCI, langsung tertekan. Investor panik karena khawatir saham-saham Indonesia akan berdampak negatif dalam indeks global. Selain itu, MSCI juga menilai kepemilikan saham masih terkonsentrasi, dan ketersediaan data investor tidak transparan.

Pihak MSCI meminta otoritas di

Indonesia segera memperbaiki kekurangan tersebut sebelum Mei 2026. Jika tidak, maka peringkat pasar modal di Indonesia akan diturunkan dari berkembang (*emerging market*) ke kategori menengah (*frontier market*).

Pernyataan MSCI itu langsung memicu tekanan besar di pasar pada hari yang sama hingga mengalami crash yang dalam. Sehari kemudian, pada 29 Januari 2026 IHSG kembali melemah, tercatat di level 7.654,66 pada pagi hari. Namun akhirnya, IHSG hari itu membaik sehingga “hanya” turun 88,35 poin atau 1,06% ke level 8.232,20. Namun, itu tetap saja gejala yang dalam mengingat hanya dalam 2 hari IHSG terperosok dalam hingga 748 poin.



Konferensi Pers OJK dan BEI pada Jumat (20/02/2026). Foto: Suar.id/Gema Dzikri.

Gejolak di pasar modal itu mendorong pemerintah, regulator, dan pengelola bursa merumuskan langkah korektif guna memperkuat integritas bursa efek. Seluruh pemangku kebijakan pasar modal Indonesia sepakat mempercepat reformasi struktural guna memulihkan kepercayaan dan kredibilitas pasar.

Ada delapan rencana aksi yang diputuskan untuk mempercepat reformasi integritas bursa saham di Indonesia. Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan delapan jurus itu adalah bentuk komitmen memperkuat reformasi struktural pasar modal.

“Delapan rencana aksi yang kami susun, ini kami kelompokkan menjadi 4 kluster, yang pertama adalah untuk kebijakan baru *free float*, kemudian yang kedua adalah untuk transparansi, kemudian cluster tata

kelola dan *enforcement*, dan juga sinergitas,” kata Friderica usai acara dialog bersama pelaku pasar modal yang digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Ahad 1 Februari 2026 lalu.

Tanggapan positif stake holder

Hingga saat ini, upaya pemulihan pasar saham Indonesia memang terus berjalan. OJK bersama *self regulatory organization* (SRO) pasar modal telah mengambil sejumlah langkah penting demi mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia, sebagai respons dari laporan MSCI pada akhir bulan Januari 2026 lalu.

Jeffry Hendrik menegaskan, khusus untuk pembahasan *free float*, pihak

otoritas bursa sudah selesai melalui tahapan *public hearing* atau *rule making rule*-nya yang digelar pada tanggal 19 Februari 2025 lalu.

“Nah, dalam proses *public hearing* itu kami sudah berdiskusi dengan banyak pihak. Dari asosiasi emiten, asosiasi perusahaan efek, asosiasi manajer investasi, bahkan dengan beberapa emiten secara *one on one*. Secara umum tanggapannya positif,” ujar Jeffrey.

Semua pihak menyadari langkah menaikkan free float adalah upaya yang baik jika semua pihak ingin melakukan pendalaman terhadap pasar modal.

Dalam pertemuan itu, semua pihak menyadari langkah menaikkan *free float* adalah upaya yang baik jika ingin melakukan pendalaman terhadap pasar modal. Meski tantangannya, bagaimana penambahan *free float* ini tidak mengganggu *price discovery*. Karena pasti akan ada banyak tambahan suplai di market yang berpotensi menurunkan harga saham.

Karena itu dibutuhkan tahapan-tahapan dan prioritas. Pihak otoritas bursa sudah minta asosiasi untuk menyusun tahapan dan prioritas. “Nah, draf peraturan 1A ini sekarang masih berproses, ada di internal bursa. Kemudian nanti akan kami ajukan ke OJK. Jadi kita lihat bagaimana nanti peraturan akhirnya. Dari situ kita bisa diskusi lagi,” ujar Jeffrey.

Sebagai upaya untuk mempermudah transisi emiten dari 7,5% menuju 15%, BEI juga telah menghadirkan layanan *hot desk* yang bisa digunakan sebagai pusat konsultasi ataupun diskusi dengan seluruh emiten untuk membahas bagaimana tahapan-tahapan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan baru tersebut.

Seluruh emiten yang saat ini saham publiknya masih berada di bawah 15% diharapkan dalam waktu 1 tahun hingga 2 tahun ini sudah bisa memenuhi ketentuan yang berlaku. “Tetapi kita juga menyediakan waktu, waktu diberikan tentunya dengan jadwal yang kita harapkan juga disampaikan secara agresif kepada bursa, ya kami juga berkomunikasi dengan asosiasi, kita akan berupaya bersama sebanyak mungkin itu bisa memenuhi ketentuan tersebut,” jelas Jeffrey.

Emiten menunggu aturan definitif

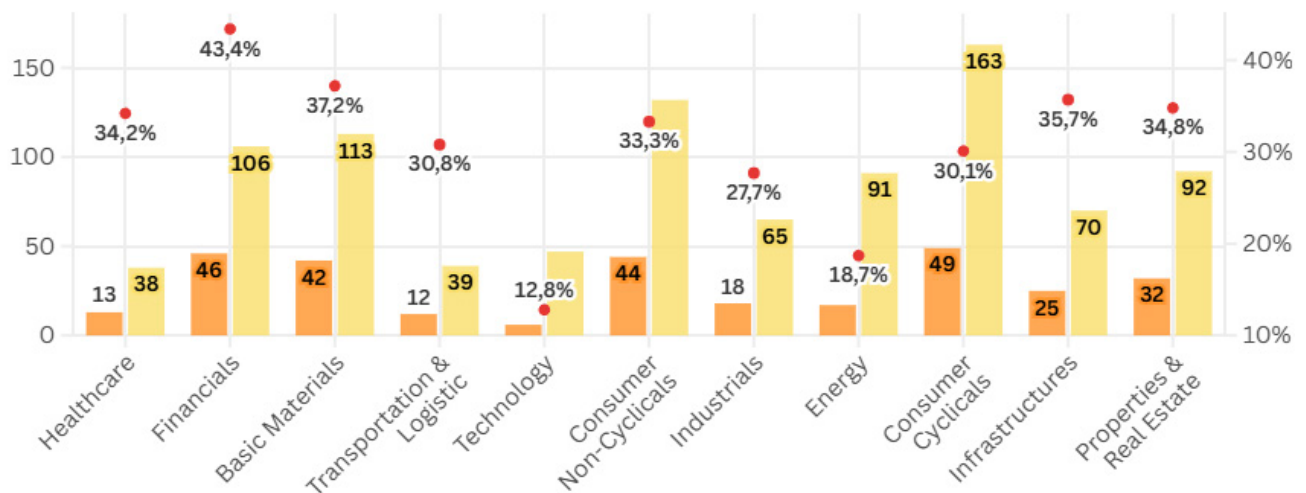
Terkait rencana kenaikan jumlah *free float* ini, para emiten meski menyatakan akan patuh dengan ketentuan baru, namun masih menunggu keputusan resmi, khususnya terbitnya aturan definitif juga petunjuk resmi dari otoritas. “Saat ini secara aturan, *free float* minimum itu 7,5%. Sehingga kami sudah memenuhi persyaratan minimum *free float*,” kata Corporate Secretary PT Midi Utama Indonesia

Tbk (MIDI) Suantopo Po saat dihubungi SUAR 26 Februari 2026 lalu.

Suantopo enggan menjelaskan langkah yang akan diambil perusahaan untuk meningkatkan porsi *free float*, kecuali jika sudah ada ketentuan yang mengatur soal kenaikannya. Ia menegaskan masih menunggu sinyal dari otoritas. “Kita menunggu aturan baru OJK,” katanya.

Free Float Emiten Kurang Dari 15% Berdasarkan Sektor

- Persentase Jumlah Emiten Free Float Kurang dari 15% dari total emiten
- Jumlah Emiten Free Float Kurang dari 15% ■ Total Emiten



Sumber: Laporan Registrasi Pemegang Saham, IDX. • Data dikurasi dan diolah Tim SUAR/Ratri.

Penghitungan jumlah emiten mengambil atau mengacu pada emiten yang terdaftar pada situs IDX dengan total 958. Terdapat 14 emiten yang tidak mempublikasikan laporan registrasi pemegang saham, termasuk 2 emiten yang tidak terlist dalam Keterbukaan Informasi. Data diambil berdasarkan publikasi laporan bulanan registrasi terakhir atau 31/1/2026 dalam kurun waktu 23-25/1/2026.

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

MIDI saat ini tercatat memiliki porsi *free float* 14,28%. Hal itu disampaikan perusahaan lewat Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia pada 6 Februari 2025.

Emiten lain, seperti OCBC NISP, di mana posisi *free float*-nya baru mendekati 14% pada Februari 2026, juga menyatakan siap berkomitmen

untuk memenuhi ketentuan baru dalam tenggat waktu yang telah diberikan.

“Pada prinsipnya kami akan mendukung dan senantiasa mematuhi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh regulator,” kata Direktur OCBC Hartati kepada Suar melalui keterangan tertulisnya, Rabu 25 Februari 2026.

Pihak OCBC NISP sendiri tengah melakukan pembahasan terkait dengan dampak kebijakan ini terhadap struktur kepemilikan dan valuasi saham, serta memitigasi risiko yang dapat terjadi. “Kami akan melakukan kajian internal untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku,” kata Hartati.

Sementara Direktur Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) Neeraj Lal menyatakan telah menerima pedoman resmi dari OJK dan juga BEI terkait kewajiban batas minimum *free float* 15%. Perusahaan selanjutnya akan melakukan kajian internal dan mempersiapkan strategi untuk menambahkan porsi saham yang diperjualbelikan di publik.

“Kami masih menanti detail lebih lanjut di regulasi, dan setelah itu kami akan mematuhi minimum *free float* 15% yang berlaku. Jadi setelah kami mengetahui peraturannya, kami akan mematuhinya,” jelasnya.

Neeraj Lal membenarkan jika posisi *free float* UNVR yang beredar di publik saat ini masih berada di bawah batas minimum 15%. Ini disebabkan aksi pembelian kembali saham atau *buyback* yang dilakukan oleh perusahaan selama beberapa waktu terakhir.

“Benar, *free float* kami masih di bawah 15%, jika melihat saham yang sudah terdigitalisasi atau *scripless*, posisi *free float* kami sedikit di atas 14%,” kata Neeraj dalam konferensi pers paparan publik yang digelar secara daring, Kamis, 12 Februari 2026.

Tidak semua emiten dalam valuasi ideal

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha mengatakan, ada sejumlah tantangan bagi emiten untuk memenuhi *free float* minimum 15%.

Menurutnya, tidak semua emiten berada pada valuasi yang ideal untuk melakukan aksi korporasi seperti *secondary offering* atau divestasi.



Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha

Selain itu, kesiapan investor juga menjadi faktor penentu, karena tidak semua saham memiliki permintaan yang cukup kuat, baik dari investor ritel maupun institusi, untuk menyerap tambahan pasokan saham.

“Belum lagi tantangan timing dan mekanisme, aksi korporasi seperti *right issue* dan *private placement*, perlu waktu juga untuk eksekusi mulai dari persetujuan RUPS,

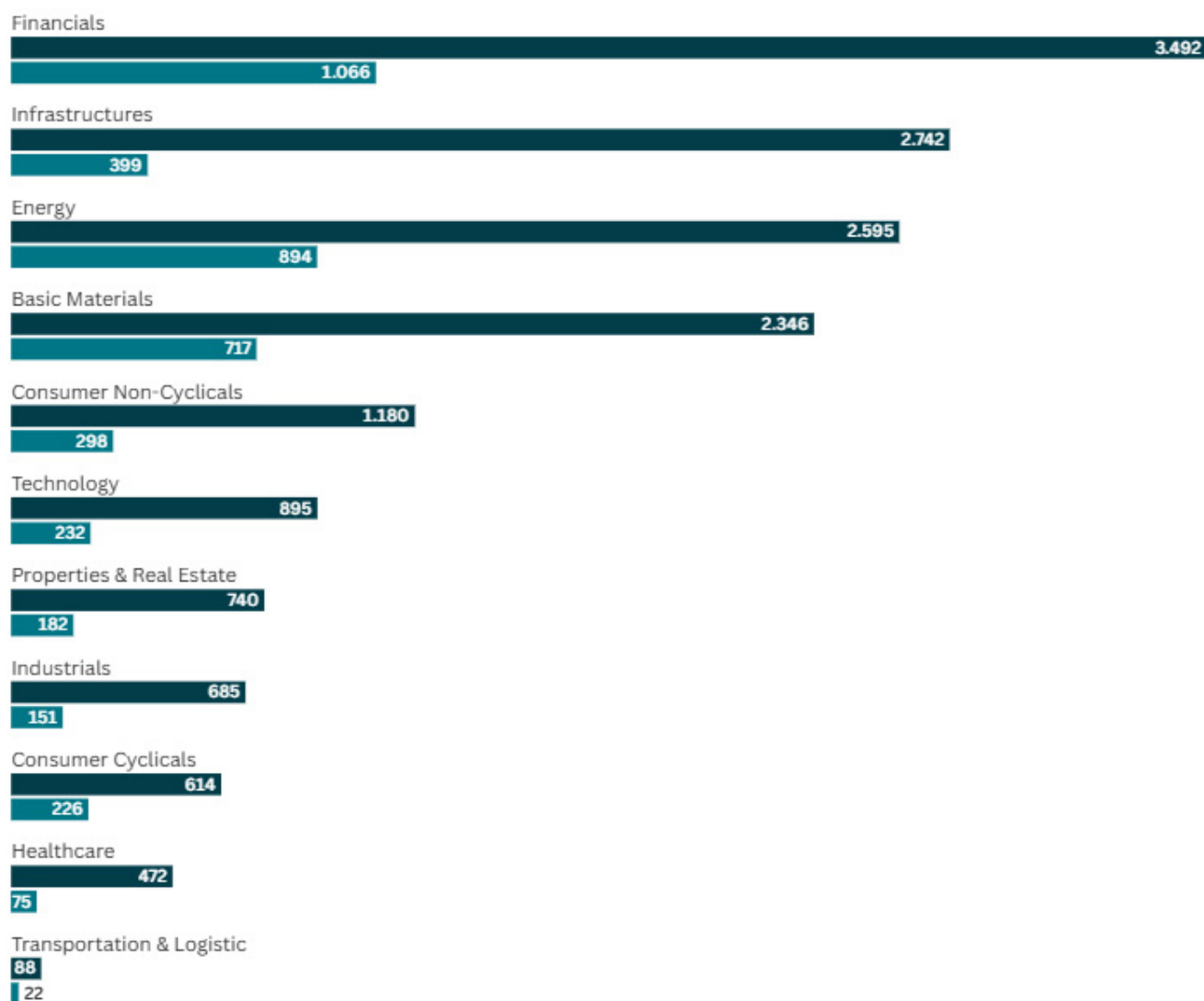
kesiapan dokumentasi, dan proses di otoritas,” katanya pada SUAR.

Lebih lanjut, AEI menilai terdapat potensi tekanan harga saham jika banyak emiten secara bersamaan melepas sahamnya di pasar. Secara teori pasar, ketika suplai meningkat dalam waktu bersamaan, tentu ada potensi tekanan harga dalam jangka pendek, apalagi jika kondisi pasar sedang kurang kondusif.

Kapitalisasi Pasar dan Value Emiten Berdasarkan Sektor Tahun 2025

(Triliun Rupiah)

■ Market Cap/ Kapitalisasi Pasar ■ Value



Sumber: Statistik Tahunan IDX, IDX. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Meski demikian, AEI menilai kebijakan peningkatan *free float* minimum 15% tetap membawa dampak positif dalam jangka panjang. Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat memperdalam pasar (*market*

depth), meningkatkan likuiditas perdagangan, mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik, serta meningkatkan *capital inflow*. “Likuiditas saham-saham akan semakin baik lagi ke depan,” katanya.

Rencana matang dan dilakukan bertahap

Ekonom yang juga Direktur Program dan Kebijakan Lembaga Riset Prasasti, Piter Abdullah, menilai aturan *free float* 15% untuk emiten ini merupakan suatu hal yang positif. Dengan meningkatkan porsi saham yang diperjualbelikan di publik, banyak dampak positif dan manfaat yang dapat dirasakan untuk pasar modal dan investor itu sendiri.

Setidaknya, menurutnya ada sejumlah dampak positif utama yang timbul akibat ketentuan tersebut mulai dari harga saham emiten yang menjadi lebih stabil hingga meningkatnya likuiditas perdagangan saham.

Namun, meningkatkan porsi saham yang diperjualbelikan di pasar modal menghadirkan tantangan tersendiri, perlu perencanaan yang matang, dan dilakukan secara bertahap agar pasar

modal tidak dibanjiri saham yang bisa menyebabkan harga menjadi anjlok.

Bertambahnya *supply* yang tidak diikuti dengan penambahan dari sisi *demand* akan membuat valuasi emiten menjadi turun. Saham yang dijual pun belum tentu bisa terserap akibat potensi demand yang kecil.

“Kalau sahamnya serentak dibuka, itu akan banjir saham. Ketika banjir saham *supply*-nya melimpah, *demand*-nya enggak ada, harganya malah terkoreksi,” ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perencanaan dengan matang mengenai tahapan pelaksanaan ketentuan *free float* tersebut sehingga tidak malah menghadirkan dampak negatif.

Jika dipaksakan untuk melakukan free float di tengah gejolak pasar modal tanpa perencanaan yang matang, bisa jadi hal tersebut malah memberikan dampak kurang baik.

Emiten pun pada dasarnya akan mematuhi ketentuan yang berlaku demi meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Namun jika dipaksakan untuk melakukan *free float* di tengah gejolak pasar modal tanpa perencanaan yang matang, bisa jadi hal tersebut malah memberikan dampak kurang baik.

Tantangan terbesar menurutnya saat ini berada di tangan regulator, bukan strategi perusahaan bagaimana mereka mengatur porsi sahamnya. “Kita ini mau *free float* yang sekarang ini harga lagi jatuh banget, saya kira perusahaan enggak bisa melakukan apa-apa, ini di luar kontrol perusahaan emiten. Kalau dia dipaksa untuk *free float* di tengah kondisi seperti ini, itu bisa menjadi bumerang bagi pasar modal sendiri,” jelas Piter.

Namun jika akhirnya *free float* 15% bisa terlaksana dengan baik, calon investor akan semakin tertarik berinvestasi di pasar modal Indonesia, khususnya investor dari luar negeri. “Jumlah investor yang lebih tinggi mungkin akan mendorong masuknya investor-investor baru khususnya investor asing bisa masuk lagi, dan itulah yang baru akan mendorong pasar menjadi lebih bergairah lagi,” katanya.

Saat ini, yang terpenting menurutnya tetap berada pada perencanaan tahapan hingga implementasi *free float* 15% yang baik. Dampak positifnya pun belum bisa terlihat saat ini. “Kalau mengandaikan, ya benar pasar akan lebih bergairah, dan itu yang memang diharapkan dari kenaikan *free float*,” ungkapnya.

Indonesian Stock Exchange





Seorang wanita berjalan melewati refleksi layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Optimisme Penyerapan Rp187 Triliun

Otoritas keuangan akan mendampingi emiten memenuhi *free float* 15%. Prosesnya bertahap, delisting hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Benediktus Krisna Yogatama, Gema Dzikri Harisma, Feby Febrina Nadeak**

Melepas saham ke publik hingga 15% sebenarnya tak perlu waktu lama. Ini yang terjadi pada emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Dalam kurun waktu sekitar satu tahun, perusahaan yang bergerak di bidang properti itu berhasil meningkatkan porsi *free float* sahamnya di publik dari 10,8% ke 15,91%.

Langkah PANI ini dimulai sejak Oktober 2024, ketika pemegang saham pengendali, PT Multi Artha Pratama (MAP), melakukan divestasi dengan cara menjual sahamnya ke publik yang bertujuan untuk meningkatkan porsi kepemilikan publik dari 10% menjadi 10,8%.



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PANI yang diselenggarakan pada 9 Oktober 2025 di Agung Sedayu Group Tower Jakarta Utara. (Dok. PIK 2)

Selanjutnya, MAP kembali melakukan aksi korporasi pada Oktober 2025, dengan menjual sahamnya ke publik hingga *free float* mencapai 12,22%. Momentum besar terjadi saat pelaksanaan *Rights Issue* III pada Desember 2025, di mana permintaan pasar melonjak tinggi.

Porsi saham yang ditebus masyarakat mencapai 817.467.939 lembar atau

67% dari *total right*, sehingga MAP hanya menebus haknya sesuai dengan komitmen sebanyak 385.356.454 lembar saham atau 32%.

"Sehingga pada tanggal 23 Desember 2025 porsi kepemilikan PANI oleh masyarakat meningkat menjadi 15,91%," kata *Corporate Secretary* PANI Christy Graseela kepada SUAR, Selasa, 24 Februari 2026 lalu.

Ketika animo pasar tinggi

Christy Graseela mengatakan, keputusan untuk menaikkan *free float* dilatarbelakangi oleh animo pasar yang tinggi terhadap saham PANI sejak proses *backdoor listing* perusahaan pada 2021. Permintaan yang besar katanya, perlu diimbangi dengan penambahan porsi kepemilikan masyarakat.

Peningkatan *free float*, ia melanjutkan, bertujuan untuk meningkatkan volume transaksi di pasar, atau meningkatkan likuiditas dan memperluas cakupan jenis investor asing maupun domestik.

Menariknya, langkah PANI ini bukanlah paksaan dari otoritas bursa. Saat ini, aturan yang berlaku masih menetapkan batas minimum *free float* sebesar 7,5%, meski BEI tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan menaikkan batas itu menjadi 15% secara bertahap dalam tiga tahun.

“Kami masih menunggu keputusan resmi dari Bursa Efek Indonesia. Di luar dari hal tersebut yang sudah diatur, PANI secara sukarela meningkatkan *free float* menyesuaikan ke permintaan pasar yang masuk ke PANI,” katanya.

Dari sisi strategi meningkatkan *free float*, PANI mengandalkan divestasi bertahap oleh pemegang saham pengendali dan memanfaatkan momentum *rights issue* untuk memperbesar partisipasi publik. Dalam periode pemesanan tambahan, bahkan terdapat permintaan pesan tambah dari investor sebanyak 27,8 juta lembar saham atau Rp 360,7 miliar.

Namun, hanya sebagian yang dapat dipenuhi, karena jumlah saham sisa hasil *rights issue* yang tersedia untuk dialokasikan kepada investor tambahan hanya senilai sekitar Rp129,4 miliar. Setelah melalui proses penjatahan, pada akhirnya *free float* PANI menjadi 15,91 %.

Untuk mencapai porsi 15% dibutuhkan waktu dan pasar yang siap menyerap saham tambahan dari pemegang saham pengendali.

Meski begitu, manajemen mengakui tantangan tetap ada. Untuk mencapai porsi 15% dibutuhkan waktu dan pasar yang siap menyerap saham tambahan dari pemegang saham pengendali.

Christy mengatakan hal-hal yang dapat digiatkan terlebih dahulu adalah memperkenalkan emiten-emiten IHSG ke domestik sehingga jumlah investor lokal lebih luas dan menyebar, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

“Dan perlu dukungan fundamental yang kuat dan *sustain* supaya investor yg sudah berinvestasi dapat melihat pertumbuhan ekonomi emiten-emiten IHSG dan makro ekonomi Indonesia secara umum,” katanya.

Upaya itu mulai menunjukkan hasil. Setelah *free float* meningkat, likuiditas saham PANI melonjak, dan jumlah pemegang saham naik signifikan dari sekitar 14 ribu pada akhir 2024 menjadi lebih dari 52 ribu di awal 2026. Ini menandakan partisipasi publik yang semakin luas.

Ke depan, PANI berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan siap menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pasar modal. “Kami akan terus berusaha

untuk mematuhi peraturan *free float* saham sesuai regulasi yang berlaku saat ini maupun ke depannya,” kata Christy.

Otoritas memberikan pendampingan

Usaha PANI melepas saham ke pasar hingga 15% lebih ke pasar dengan lancar, bisa menjadi pembelajaran bagi emiten yang lain. Apalagi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

memastikan implementasi kenaikan minimal *free float* dari 7,5% menjadi 15% akan dilakukan secara bertahap, setelah peraturan ditetapkan.



Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi (tengah) (Suar.id/Gema Dzikri)

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut, pihaknya memberi waktu hingga maksimal 3 tahun bagi emiten untuk bisa memenuhi aturan yang baru soal *free float* ini. “Pertama kami akan dorong untuk dilakukan di tahun pertama. Kemudian tahapan berikutnya di tahun kedua dan tahun ketiga menuju keseluruhan angka *free float* minum 15%,” jelasnya.

Di tahun pertama akan ada pengelompokan emiten yang sahamnya dilepas menjadi 10% dari kondisi saat ini. Kemudian berjenjang seterusnya sampai dengan angka 15%.

Dan ini bisa dilakukan bila peraturan sudah siap. “Target penyampaian atau penerbitan peraturan itu adalah Maret 2026, mudah-mudahan bisa melakukan atau menerbitkan peraturan itu bahkan lebih cepat dari apa yang direncanakan,” ungkap Hasan Fawzi.

Aturan Baru Soal Saham Free Float di Pasar Modal

| Perihal | Keterangan |
|---|-------------------------------|
| Besaran Nilai Kapitalisasi Pasar < Rp5 triliun | Jumlah Free Float Minimal 25% |
| Besaran Nilai Kapitalisasi Pasar Rp5 triliun - Rp50 triliun | Jumlah Free Float Minimal 20% |
| Besaran Nilai Kapitalisasi Pasar > Rp 50 triliun | Jumlah Free Float Minimal 15% |

Sumber: PERATURAN NOMOR I-A TENTANG PENCATATAN SAHAM DAN EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN TERCATAT
Graphics: Krisna/Suar.id

SUAR SUARA TERKORPORASI
ANALISIS & EVALUASI

Otoritas juga menyiapkan *exit policy* atau penyelesaian masalah bagi emiten yang tidak memenuhi ketentuan saham publik ke porsi 15%. Hasan Fawzi mengatakan, penerapan *exit policy* akan dilakukan setelah masa evaluasi berakhir. Jadi, aturan itu bukan diterapkan langsung setelah regulasi *free float* 15% diterbitkan.

Ia menambahkan, jika hingga batas waktu tersebut emiten masih belum mampu memenuhi ketentuan porsi saham publik sebesar 15%, regulator berpeluang menerapkan kebijakan privatisasi atau delisting.

Kendati demikian, OJK tetap membuka ruang relaksasi bagi emiten. Perusahaan, kata Hasan, dapat mengajukan proposal perpanjangan waktu kepada OJK untuk memenuhi ketentuan tersebut.

“Kami memberikan ruang untuk, katakanlah emiten tertentu yang sudah berupaya, tapi kemudian memang kondisinya belum memungkinkan untuk mengajukan proposal perpanjangan waktu dalam rangka mereka mencari kembali potensi penyerapan di pasar dan sebagainya. Jadi nanti *case by case* akan kita lakukan,” ujar Hasan.

Emiten dengan kapitalisasi pasar besar dinilai lebih mudah memenuhi ketentuan free float baru melalui aksi divestasi saham ke publik.

Menurut Hasan, emiten dengan kapitalisasi pasar besar dinilai lebih mudah memenuhi ketentuan *free float* baru, melalui aksi divestasi saham ke publik. OJK dan BEI utamanya akan mendorong pemenuhan porsi saham publik sejak tahun pertama masa transisi bagi perusahaan yang dinilai memiliki kapasitas besar.

Dalam proses evaluasi tersebut, OJK akan melibatkan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia untuk melihat kesiapan pasar dalam menyerap tambahan saham yang dilepas ke publik. Sementara itu, untuk perusahaan yang akan melantai di bursa, ketentuan *free float* minimal 15% akan diberlakukan sejak awal, melalui revisi Peraturan BEI Nomor I-A.

Bisa ditempuh dengan bermacam opsi

Pjs Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan, seiring dengan penerapan kebijakan baru peningkatan saham publik, *right issue* menjadi salah satu opsi strategis yang dapat ditempuh emiten untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik.

Namun, selain *right issue*, BEI juga menyebutkan emiten memiliki alternatif lain seperti *private placement* untuk memenuhi ketentuan *free float*. "Tentunya kami

serahkan kepada masing-masing emiten," ujarnya.

Dari sisi korporasi, emiten memiliki sejumlah opsi untuk menambah porsi saham publik. Aksi korporasi yang dapat ditempuh antara lain *rights issue*, penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) maupun non-HMETD, serta program Employee Stock Ownership Plan atau ESOP dan Employee and Management Stock Option Program (EMSOP) bagi karyawan dan manajemen.



Pjs Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik (tengah) (Suar.id/Gema Dzikri)

Saat ini, BEI mencatat dari total 956 emiten yang melepas saham ke publik, sekitar 267 emiten tercatat masih memiliki *free float* di bawah 15%. Sementara mayoritas emiten lainnya telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tahap awal, bursa akan memprioritaskan perhatian pada 49 emiten yang mewakili sekitar 90% kapitalisasi pasar dari kelompok emiten dengan *free float* rendah, mengingat potensi dampaknya terhadap likuiditas pasar secara keseluruhan.

*BEI akan cenderung mengedepankan pembinaan ketimbang menjatuhkan sanksi berat seperti suspensi atau delisting kepada emiten yang gagal memenuhi ketentuan minimal *free float* 15%.*

Jeffrey menambahkan, BEI akan cenderung mengedepankan pembinaan ketimbang menjatuhkan sanksi berat seperti suspensi atau *delisting* kepada emiten yang gagal memenuhi ketentuan minimal *free float* 15%.

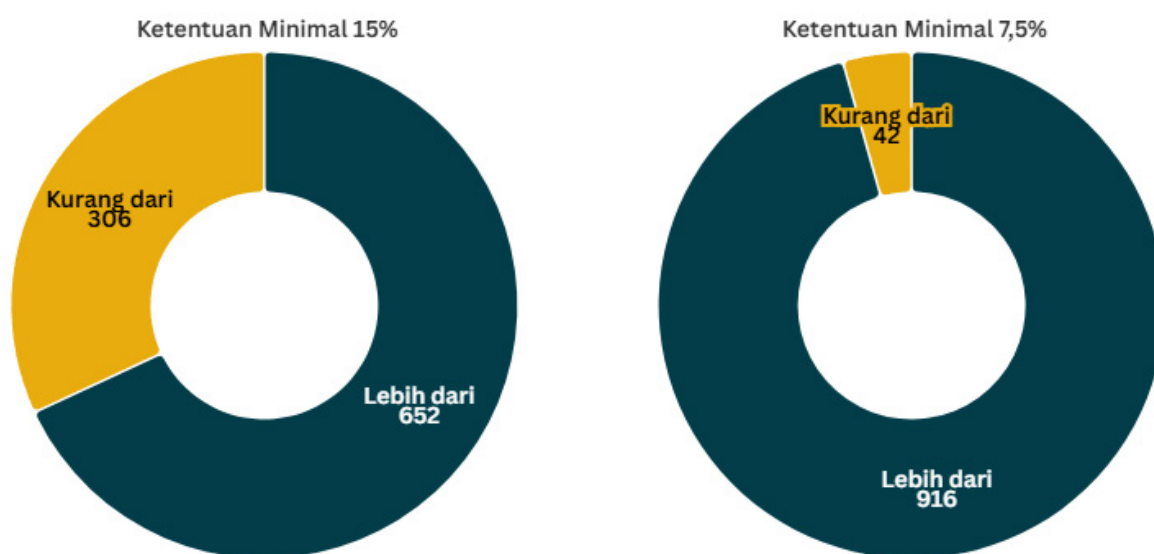
Untuk itu, BEI akan memberikan pendampingan dan tahapan penyelesaian sebelum benar-benar mempertimbangkan tindakan korektif yang lebih tegas. “Tentu, ada tahapan-tahapan yang dapat dilakukan,” sambung Jeffrey.

Sebelum sampai akhirnya perusahaan tercatat mengalami *delisting* atau penghapusan pencatatan saham, mereka diberikan waktu untuk memenuhi segala ketentuan, bantuan dari asosiasi, hingga layanan *hot desk*. Maka dari itu, Jeffrey optimis para emiten dapat memenuhi aturan tersebut.

“Tentu kita optimis, nanti ada *hot desk* untuk sarana kita berdiskusi, ada bantuan dari asosiasi, ada tahapan waktu yang diberikan, dan yang terakhir ada *delisting*,” ujarnya.

Distribusi Jumlah Emiten Berdasarkan Besaran Free Float Saham

(Per Januari 2026)



Sumber: Laporan Registrasi Pemegang Saham, IDX. • Data dikurasi dan diolah Tim SUAR/Ratri.

Penghitungan jumlah emiten mengambil atau mengacu pada emiten yang terdaftar pada situs IDX dengan total 958. Terdapat 14 emiten yang tidak mempublikasikan laporan registrasi pemegang saham, termasuk 2 emiten yang tidak terlist dalam Keterbukaan Informasi. Data diambil berdasarkan publikasi laporan bulanan registrasi terakhir atau 31/1/2026 dalam kurun waktu 23-25/1/2026.

SUAR SOLUTIONS JOURNALIST
OF EMERGING IDEAS

BEI selama ini juga intens berdialog dengan AEI untuk menyusun strategi tepat demi menjaga keseimbangan pasar ketika suplai saham publik meningkat.

Menurut Jeffrey pihaknya bukan hanya memastikan suplai bertambah,

tetapi juga mendorong permintaan investor meningkat melalui transparansi dan perbaikan tata kelola emiten. “Dengan begitu, suplai tambahan diharapkan bisa terserap lewat *price discovery* yang tetap efisien,” terang Jeffrey.

la menambahkan, sebagai otoritas regulator, pihaknya memang menghadapi emiten yang beragam. Sehingga butuh pendekatan yang berbeda-beda. “Kita juga harus

melihat bahwa kondisi pasar kita saat itu dengan saat ini berbeda. *Size*-nya berbeda, kedalamannya juga sudah berbeda,” ujar Jeffrey.



Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 pada Jumat (2/1) di Gedung Bursa Efek Indonesia, menandai dimulainya aktivitas pasar modal nasional di awal tahun 2026. (Dok. Kemenkeu)

Jika 10 tahun yang lalu, jumlah investor di bursa Indonesia masih di sekitar angka 2 juta, hari ini investor retail sudah 22 juta. “Kalau ada IPO, ratusan ribu yang *subscribe*. Artinya ekosistem pasar modal kita sudah berbeda-beda,” ujarnya.

Dari kenyataan di lapangan itu, Maka wajar saja otoritas harus mencari pendekatan yang sesuai dengan

kondisi terkini. Kondisi kedalaman pasar, jika 10 tahun lalu satu hari transaksi cuma Rp2 triliun, sekarang bisa mencapai Rp18,1 triliun, mengacu pada data tahun lalu.

Dan tahun ini sepanjang 2026 itu sudah mencapai Rp30 triliun per hari. “Jadi tantangan pasti ada, dan kita sudah memitigasi itu semua,” papar Jeffrey.

Waktu yang cukup untuk penyerapan

Hans Kwee Co-Founder PasarDana, perusahaan konsultan investasi, melihat dalam proses pemenuhan syarat *free float* itu, tidak semua tambahan suplai akan otomatis bisa diserap pasar. Hanya saham dari perusahaan dengan fundamental dan valuasi yang menarik yang kemungkinan besar akan diminati investor. “Yang fundamental dan valuasinya bagus mungkin bisa diserap pasar,” kata Hans.

la menambahkan, proses penyesuaian ini tidak akan berlangsung sekaligus, apalagi BEI juga memberikan waktu transisi yang cukup panjang bagi emiten. Menurutnya, dengan waktu implementasi yang bertahap, pasar punya cukup ruang untuk menyerap penawaran senilai Rp187 triliun itu agar seluruh emiten memenuhi ketentuan *free float* minimal 15 persen. “Kan ini tiga tahun, pelan-pelan. Harusnya bisa,” tegas Hans.



Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Berharap pada Danantara

Danantara masuk ke bursa, akan jadi penolong pasar. Perlu kedalaman juga waktu yang cukup dan valuasi yang menarik.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Gema Dzikri Harisma, Feby Febrina Nadeak**

Jurus menenangkan investor dan pasar terus dilancarkan pemerintah pasca tumbanganya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) akhir Januari 2026 lalu. Tak hanya otoritas keuangan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga mencoba mendinginkan

suasana dengan menjanjikan segera masuk ke pasar saham.

Lembaga pengelola investasi tersebut akan masuk secara bertahap melalui manajer investasi yang telah ditunjuk, sebagai bagian dari strategi awal penempatan dana BPI Danantara di pasar modal Indonesia.



Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat akan mengikuti pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, keputusan masuk ke pasar modal didorong oleh penilaian bahwa valuasi sejumlah emiten berada pada level menarik di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai masih berjalan baik.

“Minggu depan pun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kami akan berinvestasi masuk ke pasar modal, karena menurut kami *there is good value* di ekonomi Indonesia yang berjalan dengan baik,” ujar Pandu, di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Ahad, 1 Februari 2026.

Pandu menyatakan, BPI Danantara akan menjadi partisipan aktif di pasar sejak pembukaan perdagangan. Aktivitas investasi akan dilakukan secara langsung di pasar modal melalui skema yang telah disiapkan.

Ia menjelaskan, sebenarnya BPI Danantara telah mulai melakukan investasi sejak akhir Desember 2025 dan secara bertahap menambah porsi investasi setiap hari. Aktivitas tersebut terus berlanjut hingga saat ini.

Danantara telah mulai melakukan investasi sejak akhir Desember 2025 dan secara bertahap menambah porsi investasi setiap hari

Pandu tidak merinci besaran dana yang akan digelontorkan maupun sektor atau emiten yang menjadi target investasi. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi BPI Danantara untuk memanfaatkan peluang valuasi di pasar modal Indonesia.

Menurut Pandu sekitar 50% dari total pendanaan investasi BPI Danantara tahun ini akan dialokasikan ke pasar modal. Dari target penyaluran investasi sebesar US\$14 miliar atau setara Rp235,0 triliun, sekitar US\$7 miliar atau Rp117,5 triliun direncanakan mengalir ke pasar saham dan obligasi publik.

Pasar diharapkan tetap tenang

Sinyal dari BPI Danantara itu sedikit banyak memberikan dampak. Meski IHSG pada perdagangan Senin 2 Februari 2026 melanjutkan koreksi sebesar 4,88% ke 7.922, namun, indikasi positif terlihat dari neraca transaksi asing yang mencatat *net buy* sebesar Rp654,83 miliar.

Plt Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan, kinerja pasar saham di awal pekan pertama Februari mencerminkan adanya perbaikan meski indeks komposit masih terpangkas.



la mengatakan, secara regional pasar modal di Asia sebenarnya juga tertekan, menunjukkan bahwa koreksi IHSG tak hanya disebabkan oleh dinamika pengumuman pembekuan indeks saham RI oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) semata.

“Jadi kita melihatnya ini juga untuk perspektif yang lebih luas dan lebih global. Jadi market kita hari ini turun tapi ada hal-hal baik yang bisa kita

lihat,” ujar Kiki, begitu Frederica sering dipanggil, dalam konferensi pers di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin 2 Februari 2026 lalu.

Kiki juga mengatakan pada perdagangan pasca turbulensi pasar modal, saham-saham yang turun adalah saham yang secara valuasinya sudah tinggi, mengindikasikan aksi *profit taking* investor yang melakukan *rebalancing portofolio* mereka.



Sebaliknya, mencatat saham-saham fundamental kuat harganya mulai naik kembali. “Kami menghimbau kepada seluruh investor pasar modal Tanah Air tetap tenang, tidak panik. Investasi di pasar modal itu melihat

jangka panjang, kalau melihat fundamental ekonomi kita juga sangat baik dan prospek ke depan juga sangat baik. Jadi tolong jangan panik,” tegasnya.

Membangun basis institusi kuat

CEO Akela Trading System Hary Suwanda menilai, masuknya BPI Danantara ke pasar modal bisa menjadi katalis positif bagi pasar modal di tengah upaya Bursa Efek Indonesia mendorong pemenuhan ketentuan *free float* minimal 15%.

Menurutnya, BPI Danantara berpotensi memperkuat pasar jika dijalankan secara independen,

profesional, dan transparan. Menurutnya jika lembaga pengelola investasi itu berfungsi sebagai investor jangka panjang seperti Norges Bank Investment Management, maka Danantara bisa berperan memperkuat stabilitas dan kedalaman pasar. “Namun jika hanya menjadi alat stabilisasi jangka pendek, dampaknya tidak akan berkelanjutan,” katanya pada SUAR.

Persoalan utama lesunya pasar saat ini bukan terletak pada transparansi, tetapi pada konsistensi kebijakan.

Ia menilai, persoalan utama lesunya pasar saat ini bukan terletak pada transparansi, tetapi pada konsistensi kebijakan. Sehingga yang dibutuhkan adalah konsistensi regulasi, kepastian hukum, serta pendalaman likuiditas domestik. Ia menegaskan pasar tidak alergi pada transparansi, tapi pada ketidakpastian.

Lebih jauh Hary menekankan pentingnya memperkuat basis

investor domestik agar pasar modal Indonesia tidak terlalu sensitif terhadap arus modal asing.

Menurutnya, investor domestik bisa menjadi tuan rumah jika institusi dalam negeri diperkuat seperti dana pensiun, asuransi, dan *sovereign wealth fund* (swf) yang harus menjadi pembeli natural market. “Tanpa basis institusi yang kuat, pasar akan selalu sensitif terhadap arus keluar asing,” kata Hary.

Waktu yang cukup dan valuasi yang menarik

Di sisi lain, penguatan investor institusional domestik menjadi semakin penting di tengah tantangan kebijakan *free float* baru. Bursa Efek Indonesia memperkirakan pasar perlu

menyerap tambahan saham sekitar Rp187 triliun agar seluruh emiten memenuhi ketentuan minimal 15 persen.



Hary menilai angka itu bukan hal yang mustahil, tapi perlu strategi bertahap. “Rp187 triliun bukan angka kecil. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tetapi dalam *time frame* berapa lama dan dengan kualitas likuiditas seperti apa,” ungkapnya.

Ia memaparkan, rata-rata nilai transaksi harian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sekitar Rp10–Rp15 triliun. Artinya, nilai Rp187 triliun setara 12–18 hari transaksi penuh.

Namun, pasar tidak bekerja sesederhana itu.

Hary menyebut ada tiga faktor penentu agar penyerapan saham berjalan lancar. Pertama, kedalaman investor domestik. Ia mengatakan jika institusi domestik seperti dana pensiun, asuransi, dan *sovereign fund* aktif menyerap, maka pasar mampu menghadapi arus saham baru. Namun jika masih bergantung pada investor asing, risiko volatilitas akan meningkat.

Jika institusi domestik seperti dana pensiun, asuransi, dan sovereign fund aktif menyerap, maka pasar mampu menghadapi arus saham baru

Kedua, waktu dan tahapan implementasi. Hary menjelaskan, bila peningkatan *free float* dilakukan secara bertahap dalam periode 1 sampai 2 tahun, pasar relatif aman. Namun, jika dilakukan agresif dan serentak, tekanan harga hampir pasti terjadi.

Ketiga, valuasi emiten. Ia mengatakan pasar menyerap saham bukan karena kewajiban regulasi, tetapi karena valuasi menarik dan fundamental kuat,” katanya.

Ia menilai, kapasitas pasar Indonesia cukup, tetapi tidak untuk diserap secara cepat dan serentak tanpa tekanan harga. Implementasi harus bertahap, berbasis kondisi likuiditas, dan disertai penguatan investor institusi domestik. “Tanpa itu, kebijakan *free float* justru bisa menciptakan tekanan jangka pendek pada IHSG,” kata Hary.



IDX

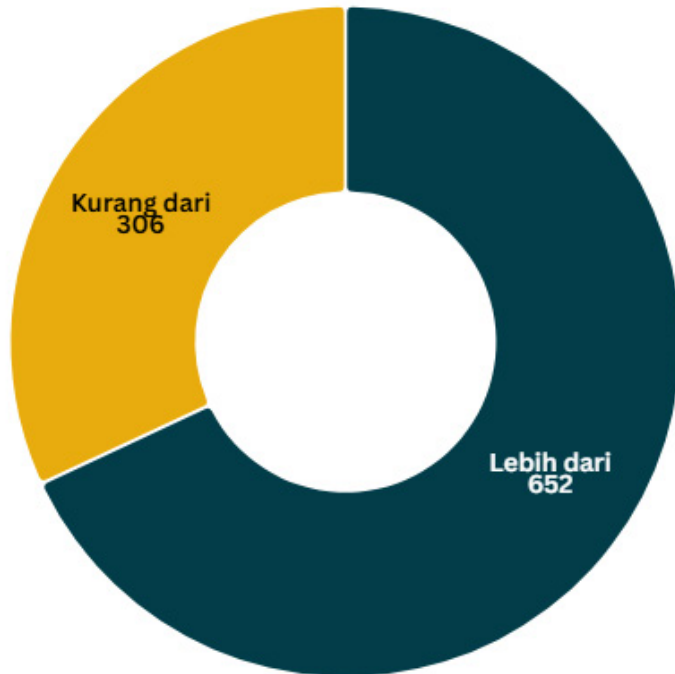
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



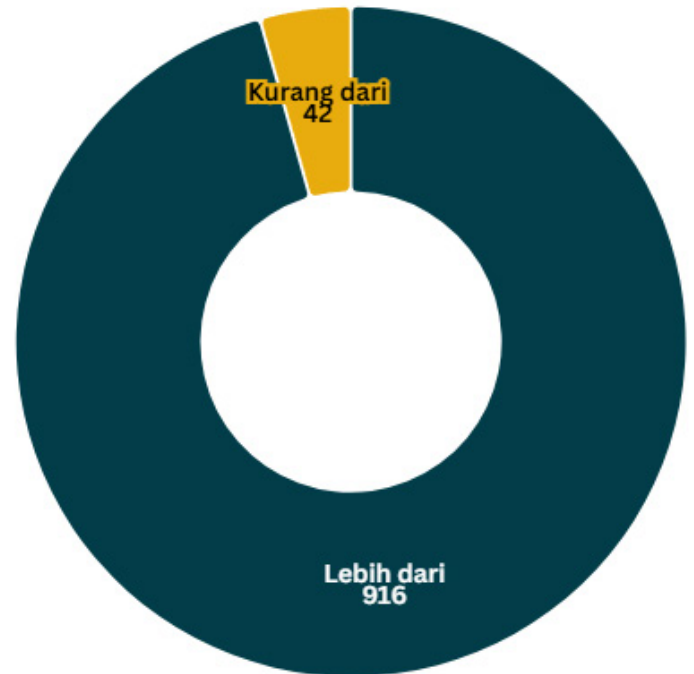
Distribusi Jumlah Emiten Berdasarkan Besaran Free Float Saham

(Per Januari 2026)

Ketentuan Minimal 15%



Ketentuan Minimal 7,5%



Sumber: Laporan Registrasi Pemegang Saham, IDX. • Data dikurasi dan diolah Tim SUAR/Ratri.

Penghitungan jumlah emiten mengambil atau mengacu pada emiten yang terdaftar pada situs IDX dengan total 958. Terdapat 14 emiten yang tidak mempublikasikan laporan registrasi pemegang saham, termasuk 2 emiten yang tidak terlist dalam Keterbukaan Informasi. Data diambil berdasarkan publikasi laporan bulanan registrasi terakhir atau 31/1/2026 dalam kurun waktu 23-25/1/2026.

SUAR SOLUTION JOURNALISM
OF EXECUTIVES

Seberapa Siapkah Emiten Indonesia Capai *Free Float* Saham 15%

Pasar modal akan memasuki babak baru *free float* saham 15%. Siapkah emiten Indonesia memenuhi aturan itu?

Penulis: **Zikrina Ratri**

Pasar modal Indonesia tengah bersiap memasuki babak baru dalam upaya meningkatkan kedalaman pasar melalui kebijakan strategis peningkatan batasan minimal saham publik atau *free float* saham sebesar 15%. Langkah ini merupakan kelanjutan dari regulasi sebelumnya pada tahun 2014 yang menetapkan batas minimal *free float* sebesar 7,5%. Seberapa siapkah emiten pasar modal Tanah Air menyambut regulasi baru ini?

Melalui aturan ini, regulator pasar modal ingin mendorong likuiditas yang lebih sehat dan memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas di lantai bursa. Aturan baru ini rencananya mulai diberlakukan Maret 2026 dengan masa transisi bagi emiten hingga maksimal 3 tahun ke depan.

Berdasarkan data per 31 Januari 2026, peta kepatuhan emiten menunjukkan mayoritas perusahaan telah memenuhi ketentuan yang akan diberlakukan, yaitu standar *free float* 15%. Dari total 958 emiten yang terdaftar di IDX, sebanyak 652 emiten atau sekitar 68% telah berhasil melampaui ambang batas 15%.

Persebaran emiten per sektor dengan *free float* di bawah 15%

Dalam klasifikasi sektoral, temuan data menunjukkan dinamika yang menarik antara ukuran perusahaan dan tingkat ketersediaan saham publik. Sektor *Financials* atau keuangan muncul sebagai sorotan utama karena memiliki persentase emiten tertinggi yang belum mencapai batas 15%, yaitu sebesar 43,4%.

Namun, tantangan besar masih membayangi 306 emiten lainnya yang terpantau belum mencapai standar tersebut. Dari kelompok yang belum memenuhi syarat ini, terdapat 14 emiten yang tidak merilis data pemegang saham dan 2 emiten tidak tercatat dalam Keterbukaan Informasi, sehingga secara definitif terdapat 292 emiten yang dipastikan memiliki *free float* di bawah 15%.

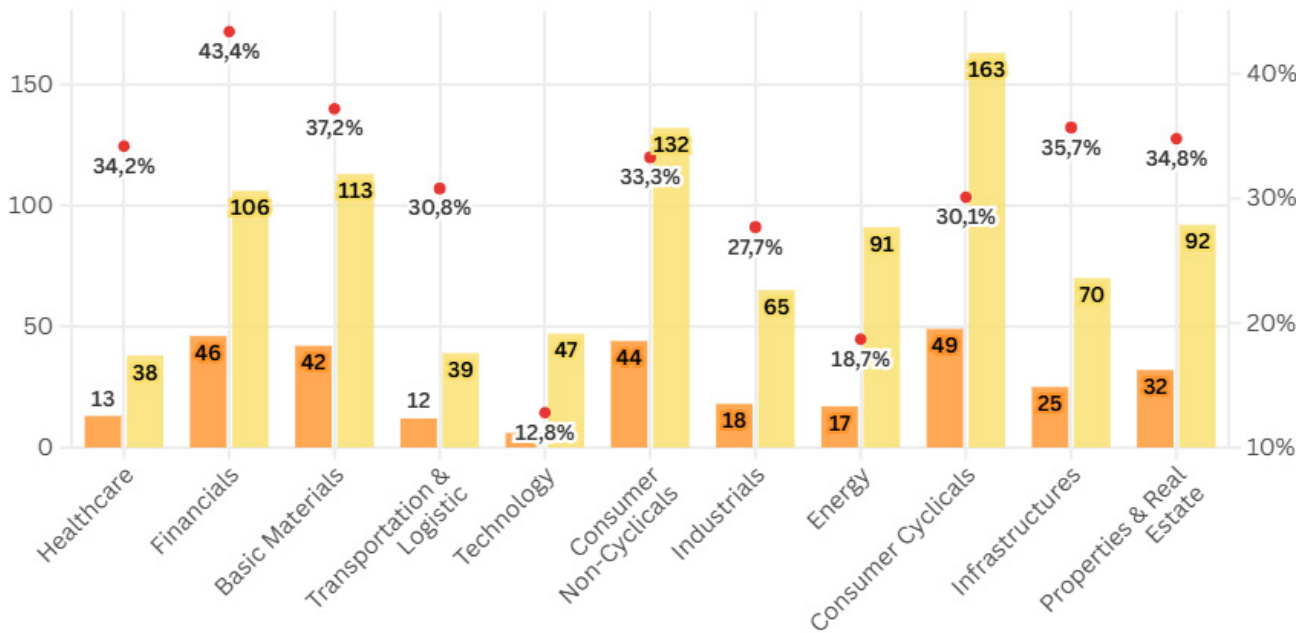
Jika menilik kembali pada standar lama sebesar 7,5%, tingkat kepatuhan emiten secara umum memang jauh lebih stabil. Tercatat lebih dari 916 emiten telah melampaui batasan 7,5% tersebut.

Meski demikian, potret tersebut masih menyisakan catatan kritis di mana terdapat 42 emiten yang posisi kepemilikan publiknya masih di bawah 7,5%. Dengan mempertimbangkan 14 emiten yang tidak memiliki data, maka terdapat 28 emiten yang secara murni hingga data laporan terakhir belum memenuhi ketentuan dasar yang sudah berlaku bertahun-tahun sebelumnya.

Tercatat sebanyak 46 emiten dari total 106 emiten di sektor *Financials* masih masuk dalam kategori kurang dari 15%. Fenomena ini sangat menarik mengingat sektor finansial merupakan raksasa bursa dengan nilai kapitalisasi pasar tertinggi mencapai Rp3.492 triliun, yang mendominasi sekitar 22,03% dari total *market cap* pasar modal Indonesia.

Free Float Emiten Kurang Dari 15% Berdasarkan Sektor

- Persentase Jumlah Emiten Free Float Kurang dari 15% dari total emiten
- Jumlah Emiten Free Float Kurang dari 15% ■ Total Emiten



Sumber: Laporan Registrasi Pemegang Saham, IDX. • Data dikurasi dan diolah Tim SUAR/Ratri.

Penghitungan jumlah emiten mengambil atau mengacu pada emiten yang terdaftar pada situs IDX dengan total 958. Terdapat 14 emiten yang tidak mempublikasikan laporan registrasi pemegang saham, termasuk 2 emiten yang tidak terlist dalam Keterbukaan Informasi. Data diambil berdasarkan publikasi laporan bulanan registrasi terakhir atau 31/1/2026 dalam kurun waktu 23-25/1/2026.

SUAR SOLUTIONS JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Berbeda dengan sektor keuangan, sektor *Consumer Cyclicals* (barang konsumen non primer) menunjukkan pola yang lebih moderat meskipun memiliki jumlah emiten terbanyak. Dari total 163 emiten di sektor ini, sebanyak 49 emiten atau sekitar 30,1% terpantau belum memenuhi kriteria *free float* 15%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun memiliki populasi perusahaan yang besar, tingkat kepatuhan sektor konsumsi ini masih berada di level menengah jika dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan pasar yang berada di angka 31,8%.

Di sisi lain, sektor Teknologi justru menunjukkan performa kepatuhan yang paling progresif terhadap aturan baru ini. Meskipun hanya memiliki total 47 emiten, sektor ini mencatatkan persentase emiten di bawah standar 15% paling rendah, yakni hanya 12,8% atau setara dengan 6 emiten saja.

Melalui paparan temuan tersebut, tantangan terbesar dari implementasi aturan ini tampak berpusat pada sektor-sektor berkapitalisasi besar. Selain finansial, sektor lain seperti infrastruktur juga mencatatkan 35,7% emiten yang masih di bawah standar, padahal sektor ini memegang *market cap* Rp2.742 triliun atau 17,30% dari total pasar.

Tantangan sekaligus peluang

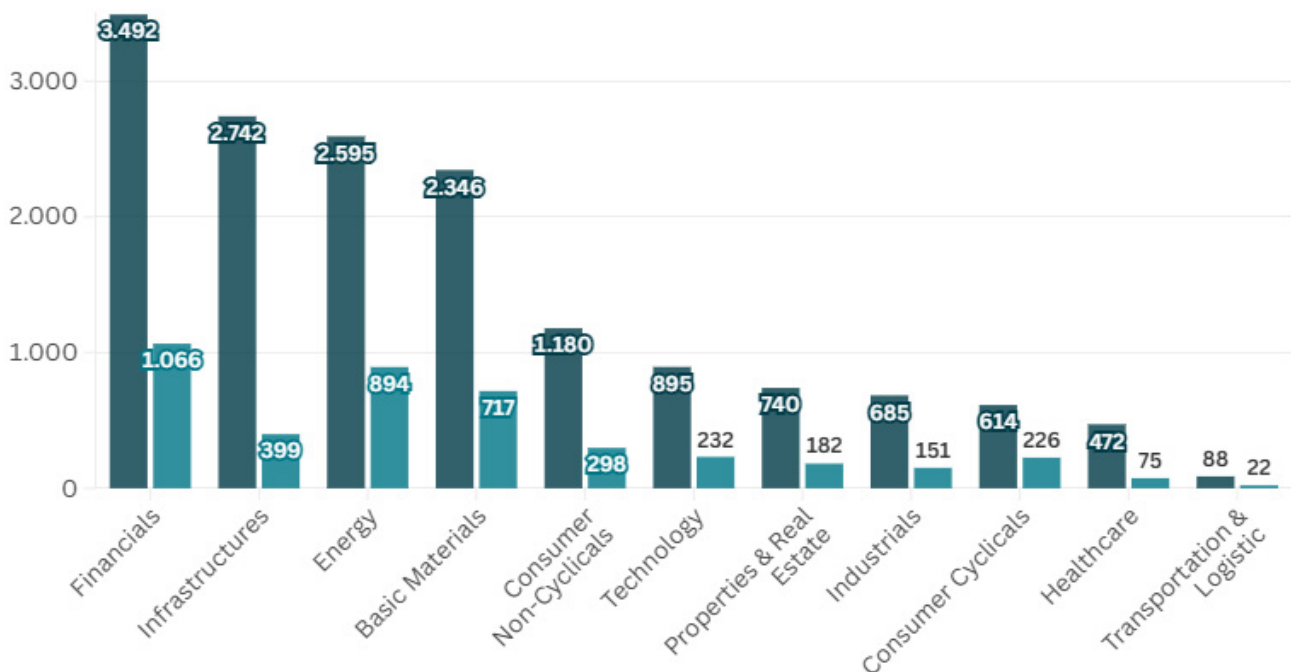
Implementasi kewajiban *free float* 15% membawa harapan besar bagi peningkatan likuiditas, namun sekaligus menghadirkan tantangan bagi stabilitas pasar bursa. Fokus utama tertuju pada sektor finansial

yang bukan hanya pemegang market cap terbesar, tetapi juga motor utama transaksi dengan nilai perdagangan (*total value*) mencapai Rp1.066 triliun atau 25% dari aktivitas bursa.

Kapitalisasi Pasar dan Value Emiten Berdasarkan Sektor Tahun 2025

(Triliun Rupiah)

■ Market Cap/ Kapitalisasi Pasar ■ Value



Sumber: Statistik Tahunan IDX, IDX. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Peningkatan porsi saham publik di sektor keuangan dan infrastruktur yang merupakan dua sektor dengan total *market cap* gabungan hampir 40% dari bursa akan potensial dan berpengaruh besar dalam meningkatkan bobot saham-saham Indonesia dalam indeks global.

Hal tersebut memberikan kesempatan bagi investor institusi untuk masuk lebih dalam ke emiten-emiten *blue chip* yang selama ini pergerakannya terbatas karena likuiditas harian yang tipis, terlihat

dari sektor finansial yang frekuensi perdagangannya sudah mencapai 52.936 kali meskipun porsi publiknya belum maksimal.


Namun, tantangan yang tidak bisa diabaikan adalah risiko terjadinya oversuplai saham di pasar. Jika 46 emiten finansial dan 25 emiten infrastruktur yang masih “kurang” melakukan divestasi secara bersamaan, pasar harus siap menyerap tambahan suplai lembar saham tersebut.

SUAR

Jurnalisme Solusi Penggerak Dunia Usaha



Kontak : CS SUAR

 **088219993888**

 **@suarinspirasi**

 **office@suar.id**

 **Suar Inspirasi Produktif**

 **Suar Inspirasi Produktif**

 **www.suar.id**